MAKALAH EKONOMI MONETER

“OJK dan Sistem Moneter Indonesia”

Disusun Oleh :

1. Sitti Amani Yazid 90500119047
2. Ratmi Wildana 90500119053

Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

2021/2020

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semogaterlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah “EKONOMI MONETER”, yang membahas tentang “OJK DAN SISTEM MONETER INDONESIA”. Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan dalam makalah ini.

Akhir kata, kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan motivasi bagi siapa saja yang membaca dan memanfaatkannya.

Kendari, 31 Oktober 2021

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dan memiliki peran yang prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan. Sistem keuangan sendiri merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, yang memiliki tugas dan fungsi utama adalah menyalurkan dana.¹ Penyaluran dana ini diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki surplus keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau yang mengalami defisit keuangan². Oleh sebab itu, suatu perekonomian harus memiliki kestabilan sistem keuangan dalam pengalihan dana tersebut agar berjalan dengan baik sehingga perekonomian dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan, karena dengan tidak stabilnya sistem keuangan akan berdampak pada menurunnya perekonomian bahkan dapat menyebabkan terjadinya krisis. Oleh karena itu, diperlukan adanya lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan dan menjalankan sistem keuangan.

Untuk memastikan sistem keuangan dapat berjalan dengan sehat dan aman, diperlukan penataan kembali terkait dengan struktur organisasi lembaga yang menjalankan peran dan fungsi pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan. Penataan tersebut bertujuan untuk memperoleh sebuah mekanisme keuangan yang efektif dan saling terkoordinasi, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang ada pada sistem keuangan. Serta diperlukan pula adanya suatu pengawasan yang efektif, dimana regulasi tentu tidak akan memiliki peran yang baik jika tidak disertai dengan sistem monitoring yang baik³. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga memperbaiki dan meluruskan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif, maka tujuannya harus dinyatakan dengan jelas dan dengan mekanisme yang tepat.

¹ Andri Soemitro, *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 17.

² Veithzal Rivai dkk, *“Bank and Financial Institution Management”*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 20.

³ Ali Syukron, *“Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah”*, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2012, h. 22-41.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat diformulasikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa itu otoritas moneter di Indonesia
2. Apa itu peran & kebijakan moneter terhadap perekonomian
3. Apa itu peran & fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem keuangan di Indonesia

C. Tujuan Pembahasan

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat diformulasikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengetahui otoritas moneter di Indonesia
2. Mengetahui peran & kebijakan moneter terhadap perekonomian
3. Mengetahui peran & fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem keuangan di Indonesia

DAFTAR ISI

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Pembahasan	4
BAB II	6
PEMBAHASAN	6
A. Otoritas Moneter di Indonesia	6
B. Kebijakan Moneter	6
1. Ruang Lingkup Kebijakan Moneter	6
2. Tujuan Kebijakan Moneter	7
3. Prinsip – prinsip Kebijakan Moneter	7
C. Peranan Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian	8
D. Peranan Bank Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Stabilitas Keuangan	9
E. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan	10
BAB III	13
KESIMPULAN	13
A. Kesimpulan	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB II

PEMBAHASAN

A. Otoritas Moneter di Indonesia

Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang

Menurut UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai tujuan agar otoritas moneter dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian

Undang – undang tentang bank sentral yang baru ini pada dasarnya memberikan kewenangan yang besar kepada Bank Indonesia untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Dengan kata lain, Bank Indonesia ditempatkan sebagai otoritas moneter di Indonesia, sedangkan Dewan Moneter ditiadakan. Meskipun otoritas moneter tidak terletak lagi pada pemerintah, pemerintah tetap mempunyai akses tertentu dalam mempengaruhi kebijakan moneter. Namun, pada akhirnya lahirlah UU No. 3 Tahun 2004. Undang – undang yang baru ini bukan menggantikan undang – undang sebelumnya, tetapi merevisi beberapa pasal serta menambah beberapa pasal baru.

B. Kebijakan Moneter

1. Ruang Lingkup Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan dan kemakmuran masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Kebijakan Moneter Ekspansif / *Monetary Expansive Policy*

Merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar untuk mempercepat recovery

2) Kebijakan Moneter Kontraktif / *Monetary Contractive Policy*

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar yang disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*) untuk menghindari overheating.

2. Tujuan Kebijakan Moneter

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Oleh karena itu kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Tentunya sasaran tersebut perlu dicapai secara serempak dan maksimal. Atau dengan kata lain melalui kebijakan moneter diharapkan dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah serta perkembangan keseimbangan neraca pembayaran yang mantap.

Banyak yang mempertimbangkan stabilitas harga sebagai tujuan yang paling utama di Negara yang sedang berkembang karena di Negara berkembang banyak mengalami inflasi dan juga dirasakan bahwa kebijakan moneter lebih efektif dalam menghadapi inflasi dibandingkan dengan kebijakan fiskal. Tingkat jumlah uang yang beredar harus dapat mengimbangi pertumbuhannya, untuk menghindari deflasi dengan demikian dapat diharapkan bahwa kebijakan moneter dapat memperlancar jalannya pertumbuhan ekonomin dalam mencapai tingkat yang lebih tinggi.

3. Prinsip – prinsip Kebijakan Moneter

Prinsip – prinsip yang sering digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan moneter khususnya di negara – negara berkembang adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki satu sasaran utama, yaitu sasaran inflasi, yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian (*overriding objective*) dan acuan (*nominal anchor*) kebijakan moneter.
- 2) Bersifat antisipasif (*preemptive atau forward looking*) mengingat adanya efek tunda kebijakan moneter, kebijakan yang diambil akan berakibat pada masa datang.
- 3) Mengikatkan diri kepada suatu aturan (*rule*), tetapi cukup fleksibel dalam operasionalnya (*constrained discretion*)
- 4) Transparan dan berakuntabilitas (*good governance*)

C. Peranan Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian

Tugas kebijakan moneter pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan di negara maju. Ada beberapa faktor menyebabkan hal ini. *Pertama*, tugas untuk menciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertambahannya dapat selalu selaras dengan jalannya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat di kalangan penguasa moneter dan juga di pihak pemerintah. Kekurangan modal, dan terbatasnya pendapatan pemerintah sering kali menimbulkan dorongan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk meminjam secara berlebihan pada bank Sentral. Jika ini, dilakukan laju pertambahan jumlah uang tunai dan akan menjadi lebih cepat dari yang diperlukan. *Kedua*, Bank sentral di negara berkembang harus lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri (ekspor dan impor). Kegiatan di sektor ini sangat mudah menimbulkan inflasi negar tersebut, karena harga mentah yang diekspor selalu naik turun. Maka, penerimaan dari kegiatan ekspor selalu mengalami perubahan yang tidak teratur. Adakalanya tingkat kenikan yang besar sekali, dan ada kalanya sangat merosot, akibat dari naik turunnya pendapatan ekspor kepada ketabilan ekonomi dan kelancaran pembangunan⁴.

Dengan meningkatkan ketelitian dari kebijakan moneter yang lebih berhati terhadap pengeluaran uang dalam negeri dan perdagangan luar negeri, ketabilan jumlah uang beredar akan lebih terarah dan akan menjadi penyeimbang dalam kebijakan yang dilakukan untuk pengeluaran pemerintah yang dapat disebut dengan kebijakan fiskal. Efektifitas kebijakan moneter yang dapat terlihat bagaimana mengembangkan sektor pedesaan dengan baik untuk menyalurkan ke dalam unit yang membutuhkan. Berkaitan dengan lembaga ekonomi, terkandung konsep mengenai pasar desa dan kemudian konsep modern mengenai agropolitan, kota pertanian sebagai pusat perdagangan dan pelayanan jasa masyarakat pertanian. Lembaga pasar dan agropolitan ini memfasilitasi proses terbentuknya pasar dan ekonomi pasar. Perdagangan dan jasa membutuhkan alat pembayaran yaitu uang. Karena itu, perkembangan pasar ikut menumbuhkan proses monetisasi pedesaan. Di daerah pedesaan, bank akan memiliki corak tersendiri yang diwarnai oleh perilaku masyarakat pedesaan. Karena itu, kemudian timbul konsep, mengenai Bank Pedesaan (*rural bank*) sebagai lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Di Indonesia, Bank rakyat Indonesia (BRI) merupakan model bank pedesaan dengan ciri BRI Unit desanya yang berhasil memfasilitasi proses monetisasi pedesaan⁵

Untuk negara berkembang, diperlukan suatu kerjasama dengan setiap Bank Umum agar mampu sebagai Bank yang dapat memberikan pinjaman selaras dengan kebijakan

⁴ Sukirno, S., (2011). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Prenada Media Group, Jakarta.

⁵ Rahardjo, D., (2011). *Nalar Ekonomi Politik Indonesia*, IPB Press, Bogor

pemerintah untuk membantu permodalan pada UMKM. Namun prinsip penggunaan modal yang diberikan kepada UMKM, diperlukan perhatian yang selektif agar bisa menjadi cara untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Terhadap lembaga asing, juga diperlukan sautu kehati-an dalam melakukan seleksi, agar terjadinya profesionalisme dalam tindakan yang bersifat kebijakan moneter.

D. Peranan Bank Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Stabilitas Keuangan

Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah⁶ :

Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. *Kedua*, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. *Ketiga*, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. *Keempat*, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. *Kelima*, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort (LoLR)*.

Dengan demikian, Bank Indonesia sangat berperan dalam menjalankan kebijakan moneter secara makro prudential dengan instrumen yang telah ada. Bank Indonesia akan menjalankan suatu kebijakan untuk melihat bagaimana proses kebijakan moneter bisa terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan suatu permasalahan secara makro ekonomi. Namun banyak permasalahan yang timbul sebagai dampak dari persoalan mikro ekonomi seperti asuransi yang sangat berpengaruh dengan perekonomian dan sebagai control yang lebih jelas, dibuatlah lembaga yang memantau kebijakan moneter dengan fungsi mikro prudential yang sudah dibentuk yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan⁷:

⁶ www.bi.go.id , *Peran BI*, Diakses pada 31 Oktober 2021

⁷ www.ojk.go.id *tugas-dan-fungsi*, Diakses pada 31 Oktober 2021

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

Dengan berkolaborasinya Bank Indonesia dan Otoritas jasa keuangan, tentunya akan memudahkan tugas dalam mengawasi segala permasalahan hingga ke bagian yang terkecil. Masyarakat juga lebih dimudahkan dalam memberikan pertanyaan dan bisa diselesaikan segala permasalahan keuangan hingga ke bagian yang terkecil. Saat ini, efektifitas kedua lembaga ini, sangat mampu untuk membantu hingga pada lapisan terkecil baik kabupaten dan kota. Namun untuk menjangkau hingga ke pelosok daerah secara significant, masih diperlukan sosialisasi secara lebih intensif. Dengan dilakukan sosialisasi secara intensif, maka akan membuat masyarakat dapat optimal mengendalikan sistem keuangan.

E. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang terintegrasi maupun independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.⁸ OJK ini merupakan lembaga yang bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*). Tujuan dibentuknya OJK ini adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang teratur, adil akuntabel dan transparan. Oleh sebab itu, OJK memiliki peran yang penting dalam menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Sedangkan OJK merupakan lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan:⁹

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan

⁸ <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx> Diakses pada 31 Oktober 2021

⁹ Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan

- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pengaturan dan pengawasan, OJK memiliki wewenang:¹⁰

- 1) Pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan Bank
 - a) Izin pendirian bank, pembukaan cabang bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, manajemen sumber daya manusia, merger, konsolidasi akuisisi bank, dan pencabutan izin usaha
 - b) Kegiatan perbankan, termasuk sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan aktivitas bank pada sektor jasa
 - c) Pengaturan dan pengawasan kesehatan bank meliputi: likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio solvabilitas minimum, batas kredit maksimum, rasio pinjaman terhadap deposito dan cadangan bank; laporan bank yang berkaitan dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit; dan standar akuntansi bank
 - d) Pengaturan dan pengawasan terkait dengan aspek kehati-hatian bank, termasuk: manajemen resiko; manajemen bank; prinsip mengetahui pelanggan; dan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan bank lainnya.
- 2) Peraturan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) termasuk:
 - a) Menetapkan regulasi-regulasi dan keputusan OJK
 - b) Menetapkan regulasi-regulasi tentang pengawasan pada sektor jasa keuangan
 - c) Menyusun dan menetapkan tentang pelaksanaan tugas OJK
 - d) Menyusun dan menetapkan prosedur tata cara pengelola pada lembaga jasa keuangan
 - e) Menetapkan struktur organisasi serta ikut mengawasi lembaga keuangan
- 3) Pengawasan terhadap lembaga keuangan (bank dan non-bank), termasuk:
 - a) Menetapkan kebijakan pengawasan operasional lembaga keuangan
 - b) Melakukan pengawasan pelaksanaan, perlindungan konsumen, tugas dari manager eksekutif dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan
 - c) Memberikan instruksi tertulis kepada lembaga keuangan dan / atau pihak tertentu
 - d) Melakukan penunjukan dan Pengangkatan pengelola statuter
 - e) Memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan di sektor keuangan

¹⁰ biaya Dalam Investasi Bodong, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 85-95.

- f) Memberi dan / atau menarik izin usaha, izin pribadi, surat pendaftaran terdaftar, persetujuan untuk melakukan kegiatan bisnis, ratifikasi, persetujuan atau penentuan pembubaran dan ketentuan lainnya

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Efektifitas Kebijakan Moneter dalam perekonomian nasional untuk kebijakan stabilisasi ekonomi yang ditempuh selama ini mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih seimbang. Bank Indonesia akan memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung penguatan struktur perekonomian domestik. Selain itu, koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan diintensifkan dalam mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan, agar penyesuaian ekonomi tetap terkendali dan mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Tujuan dibentuknya OJK ini adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*).

Bank Indonesia adalah suatu lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu Bank Indonesia dalam hukum Perbankan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan dalam menentukan dan memberikan arah perkembangan perbankan karena sistem perbankan memiliki fungsi dan peran yang penting dan strategis dalam menggerakkan pembangunan nasional dan memiliki hubungan yang erat dengan OJK dalam kebijakan dan sistem keuangan moneter sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Rahardjo, D. (2011). *Nalar Ekonomi Politik Indonesia*. Bogor: IPB Press.

Rivai, V., & dkk. (2007). *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Samsul, S. H., & Nasution H.G. (2019). Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*1(1), 16-28.

soemitro, a. (2009). *bank dan lembaga keuangan syariah*. jakarta: kencana.

Sukirno.S. (2011). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Syukron, A. (2012). Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 22-41.

www.ci.go.id , *Peran BI*, Diakses pada 31 Oktober 2021

www.ojk.go.id *tugas-dan-fungsi*, Diakses pada 31 Oktober 2021